



## Implementasi Kebijakan Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Strategis sebagai Mitigasi Bencana Non-Alam di Kabupaten Gresik

Yudi Putranto<sup>1</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>2\*</sup>, Nihayatus Sholichah<sup>3</sup>, Kresna Adhi P<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ika.devy@unitomo.ac.id](mailto:ika.devy@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *The development of fire stations (Pos Damkar) in Gresik Regency represents a strategic step to strengthen fire disaster mitigation in a rapidly growing region. New stations in strategic districts such as Manyar, Kebomas, and Driyorejo aim to shorten response times and improve the effectiveness of fire handling. A transformation has also occurred in the role of firefighters, who are no longer merely reactive but also active as community mobilizers, facilitators, and educators. Through education programs, volunteer training, and regular evacuation drills, public awareness of fire prevention is significantly enhanced. Educational programs include the use of fire extinguishers, counseling on electrical short-circuit and gas leak hazards, as well as evacuation simulations in schools and industrial areas. Capacity building is further supported by cross-sector partnerships, involving schools, industries, and private stakeholders. The establishment of fire volunteers strengthens early detection and initial response, accelerating mitigation efforts and reducing losses. Technologies such as Geographic Information Systems (GIS) and integrated communication systems are being applied to improve efficiency and effectiveness. Despite challenges such as limited funding, strategic land availability, and the need for more competent human resources, collaboration with the private sector is expected to address these gaps. Overall, the development of fire stations and the transformation of firefighter roles create an integrated mitigation system based on infrastructure, education, and community empowerment, making Gresik safer, more resilient, and sustainable.*

**Keywords:** *Community Empowerment; Disaster Mitigation; Fire Safety Education; Fire Station (Pos Damkar); Volunteers.*

**Abstrak.** Pembangunan pos pemadam kebakaran (Pos Damkar) di Kabupaten Gresik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mitigasi bencana kebakaran di wilayah yang berkembang pesat. Pos baru di kecamatan strategis seperti Manyar, Kebomas, dan Driyorejo bertujuan memperpendek waktu respons serta meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran. Transformasi juga terjadi pada peran petugas Pos Damkar yang tidak hanya reaktif, tetapi aktif sebagai penggerak komunitas, fasilitator, dan edukator. Melalui program edukasi, pelatihan relawan, dan simulasi evakuasi berkala, kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran semakin ditingkatkan. Program sosialisasi meliputi penggunaan APAR, penyuluhan bahaya korsleting listrik dan kebocoran gas, hingga simulasi evakuasi di sekolah maupun lingkungan industri. Penguatan kapasitas dilakukan melalui kemitraan lintas sektor, seperti kerja sama dengan sekolah, industri, dan pihak swasta. Pembentukan relawan kebakaran turut berperan dalam deteksi dini serta penanganan awal, sehingga mempercepat respons dan mengurangi kerugian. Penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sistem komunikasi terpadu diintegrasikan untuk menunjang efektivitas layanan. Meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan dana, lahan, dan sumber daya manusia, kolaborasi dengan sektor swasta diharapkan mampu mengatasinya. Secara keseluruhan, strategi pembangunan Pos Damkar dan transformasi peran petugas menciptakan sistem mitigasi terpadu berbasis infrastruktur, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menjadikan Gresik lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Edukasi Kebakaran; Mitigasi Bencana; Pemberdayaan Masyarakat; Pos Damkar; Relawan.

### 1. LATAR BELAKANG

Gresik sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat. Pembangunan industri, perumahan, dan infrastruktur terus berkembang, terutama di kecamatan-kecamatan strategis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, pertumbuhan ini juga membawa risiko, termasuk peningkatan potensi

bencana non-alam. Bencana non-alam, seperti kebakaran, menjadi ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian materi, korban jiwa, dan mengganggu stabilitas sosial serta ekonomi. Data menunjukkan bahwa insiden kebakaran di Gresik, baik di area perumahan, industri, maupun lahan kosong, cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Ambarwati et al., 2025). Kebakaran merupakan salah satu bencana yang memerlukan penanganan cepat dan efektif. Keterlambatan dalam penanganan dapat memperparah dampak kerusakan. Saat ini, Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) yang ada di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh wilayah secara cepat, terutama di kecamatan-kecamatan yang padat penduduk dan industri. Jarak yang jauh antara Pos Damkar dengan lokasi kejadian menjadi hambatan utama. Waktu tanggap (response time) yang ideal, yaitu kurang dari 15 menit, seringkali tidak tercapai. Akibatnya, api sudah membesar saat petugas tiba, membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit dan berbahaya (Putri, 2024).

Menyadari urgensi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik merencanakan implementasi kebijakan pembangunan Pos Damkar di kecamatan-kecamatan strategis. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat waktu tanggap dan meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran. Kecamatan-kecamatan yang menjadi prioritas, seperti Manyar, Kebomas, dan Driyorejo, dipilih berdasarkan tingginya kepadatan penduduk, konsentrasi industri, dan volume aktivitas ekonomi (Rohimah et al., 2023). Pembangunan Pos Damkar di lokasi-lokasi ini diharapkan dapat menjadi pusat respons cepat yang mampu menjangkau area sekitarnya dengan lebih optimal. Implementasi kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek lain, seperti penempatan personel yang terlatih, penyediaan peralatan modern, serta program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya Pos Damkar yang baru, diharapkan koordinasi antara instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian, dan masyarakat, dapat berjalan lebih baik. Selain itu, pembangunan Pos Damkar juga menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana yang lebih luas, yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif. Program-program pencegahan, seperti pemeriksaan rutin terhadap sistem kelistrikan di bangunan, simulasi evakuasi, dan kampanye kesadaran bahaya kebakaran, dapat diintensifkan dengan adanya basis operasional yang lebih dekat dengan masyarakat (Made & Septanaya, 2024).

Secara keseluruhan implementasi kebijakan pembangunan Pos Damkar di kecamatan-kecamatan strategis di Kabupaten Gresik merupakan langkah proaktif dan strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mitigasi bencana non-alam, khususnya kebakaran. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, aset publik, dan aset ekonomi dari ancaman kebakaran. Dengan adanya Pos

Damkar yang baru, diharapkan Kabupaten Gresik dapat menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman, serta mampu meminimalisir kerugian akibat kebakaran, sehingga pertumbuhan dan pembangunan dapat terus berjalan tanpa terhambat oleh risiko bencana (Candra & Prabawati, 2025).

**Tabel 1.** Peran Pos Pemadam Kebakaran Sebagai Simpul Edukasi Dan Kemitraan Komunitas Di Kabupaten Gresik

Aspek Kunci	Sub-Aspek	Deskripsi Temuan
Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Pemahaman Risiko	Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa sebelum adanya program edukasi, banyak yang tidak menyadari bahaya potensial dari instalasi listrik yang buruk atau kebiasaan memasak yang ceroboh. Mereka mulai memahami bahwa pencegahan adalah kunci utama.
	Respons & Tindakan Awal	Sebagian besar warga melaporkan bahwa mereka kini lebih tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran kecil, seperti menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) atau segera menghubungi petugas. Ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas diri.
Kemitraan & Partisipasi Komunitas	Pembentukan Relawan	Analisis dokumen menunjukkan adanya inisiasi pembentukan "Relawan Kebakaran" di beberapa Rukun Warga (RW) yang berdekatan dengan Pos Damkar. Relawan ini dilatih secara khusus untuk memberikan bantuan awal sebelum tim utama tiba.
	Kerja Sama Lintas Sektor	Pertemuan dengan perwakilan sekolah dan industri menunjukkan adanya inisiatif untuk mengadakan simulasi evakuasi secara berkala. Ini menandakan kolaborasi yang efektif antara Pos Damkar dengan pihak swasta dan institusi pendidikan.
Ekspektasi & Harapan Terhadap Pos Damkar	Pusat Informasi	Warga berharap Pos Damkar tidak hanya menjadi tempat untuk memadamkan api, tetapi juga sebagai sumber informasi terpercaya terkait penanggulangan bencana, termasuk banjir, gempa, dan bencana non-alam lainnya.
	Fasilitator & Mentor	Pelaku industri dan pengelola gedung komersial mengharapkan Pos Damkar dapat berperan sebagai fasilitator yang memberikan audit keamanan kebakaran secara berkala, serta menjadi mentor bagi tim keamanan internal mereka.

*(Sumber penelitian 2025)*

Berdasarkan Tabel 1 di atas tentang peran Pos Pemadam Kebakaran sebagai pusat edukasi dan kemitraan komunitas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pos Damkar tidak hanya berfungsi sebagai unit penanggulangan kebakaran semata, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan jejaring kemitraan lintas sektor. Salah satu aspek penting yang terlihat adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran dan bahaya lain yang mungkin timbul akibat kurangnya perhatian terhadap aspek keamanan dan pencegahan. Melalui program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Pos Damkar, warga mulai memahami pentingnya pencegahan bahaya, seperti mengenali tanda-tanda bahaya dari instalasi listrik yang buruk atau kebiasaan memasak yang ceroboh. Hal ini tercermin dari meningkatnya respons dan tindakan awal warga saat menghadapi kebakaran kecil, yang menunjukkan peningkatan kapasitas diri dalam menghadapinya. Selain itu,

keberhasilan Pos Damkar dalam membangun kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat terlihat dari terbentuknya relawan kebakaran di lingkungan sekitar dan adanya kerja sama lintas sektor dengan institusi pendidikan maupun industri. Inisiatif pelatihan relawan dan simulasi evakuasi secara berkala membuka peluang untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat respon tanggap terhadap bencana. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Pos Damkar mampu membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama terhadap keamanan lingkungan mereka. Harapan masyarakat agar Pos Damkar tidak hanya berperan sebagai pusat penyelamatan, tetapi juga sebagai pusat informasi terpercaya mengenai berbagai jenis bencana, menunjukkan kepercayaan dan keinginan masyarakat agar Pos Damkar menjadi lembaga yang holistik dan adaptif terhadap kebutuhan komunitas.

Selain aspek edukasi dan kemitraan, pelaku industri dan pengelola gedung komersial menginginkan Pos Damkar berperan sebagai fasilitator audit keamanan dan mentor kegiatan peningkatan standar keamanan kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa Pos Damkar harus mampu memperluas peran ke luar bidang prosedural penanggulangan darurat, menjadi pusat pengembangan kapasitas dan pengetahuan yang terus menerus. Kesimpulannya, kekuatan Pos Damkar dalam membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas komunitas, serta menjalin kemitraan yang erat akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan risiko kebakaran dan bencana lainnya. Dengan memperkuat aspek edukasi, kemitraan, dan peran sebagai sumber informasi serta fasilitator, Pos Damkar dapat menjadi ujung tombak dalam menciptakan masyarakat yang resilien dan tanggap terhadap berbagai ancaman keamanan dan bencana alam maupun non-alam.

## **2. LANDASAN TEORI**

Landasan teori ini akan membahas konsep-konsep kunci yang relevan dengan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran sebagai Upaya Mitigasi Bencana Non-Alam. Teori-teori ini akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena yang terjadi di Kabupaten Gresik.

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan tidak hanya sekadar menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan tahapan. Model implementasi kebijakan yang relevan untuk penelitian ini adalah Model Top-Down dan Bottom-Up. Model Top-Down (Pressman dan Wildavsky): Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada seberapa jelas tujuan dan sasaran kebijakan yang dirumuskan di tingkat atas, serta seberapa baik koordinasi dan komunikasi yang terjalin. Dalam

konteks pembangunan Pos Damkar, model ini akan menganalisis bagaimana keputusan dari Pemerintah Kabupaten Gresik diterjemahkan menjadi tindakan konkret di tingkat kecamatan. Faktor-faktor seperti alokasi anggaran, peraturan teknis, dan penetapan lokasi sangat krusial di sini (Septiawan & Sujana, 2022). Model Bottom-Up (Lipsky dan Sabatier): Sebaliknya, model ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh peran "pelaksana di lapangan" (street-level bureaucrats) dan partisipasi dari aktor non-pemerintah, seperti masyarakat dan pelaku industri. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana petugas pemadam kebakaran, relawan, dan warga lokal berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan dan operasional Pos Damkar. Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran menjadi elemen penting dalam model ini (Maharaksa et al., 2025)

### **Teori Mitigasi Bencana**

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi Struktural: Konsep ini berfokus pada pembangunan fisik untuk mengurangi dampak bencana. Pembangunan Pos Damkar itu sendiri adalah bentuk mitigasi struktural. Keberadaan pos-pos ini secara langsung mengurangi kerentanan wilayah terhadap kebakaran dengan mempercepat waktu tanggap (Fariza & Handayani, 2022). Mitigasi Non-Struktural: Ini merujuk pada kebijakan, aturan, atau praktik yang bertujuan mengurangi risiko. Dalam konteks penelitian, ini mencakup peraturan zonasi yang mengamankan ketersediaan jalur evakuasi, program edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, serta pembentukan tim relawan di tingkat komunitas. Penelitian akan mengkaji bagaimana pembangunan fisik (struktural) didukung oleh upaya non-struktural ini, menciptakan sistem mitigasi yang holistik (Tyas et al., 2022).

### **Teori Perencanaan Strategis**

Pembangunan Pos Damkar di kecamatan strategis bukanlah keputusan yang acak, melainkan hasil dari perencanaan yang matang. Teori Perencanaan Strategis (Bryson) menggarisbawahi pentingnya identifikasi masalah, analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan visi dan misi, serta penetapan strategi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah melakukan analisis risiko dan kerentanan untuk mengidentifikasi kecamatan mana yang paling membutuhkan Pos Damkar. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, konsentrasi industri, dan riwayat kejadian kebakaran menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Dengan menggunakan landasan teori ini, penelitian akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti Apakah kebijakan pembangunan Pos Damkar di Gresik diimplementasikan

secara efektif (menurut model Top-Down atau Bottom-Up)? Sejauh mana pembangunan ini berkontribusi pada upaya mitigasi bencana (struktural dan non-struktural)? Apakah lokasi yang dipilih (kecamatan strategis) merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan berbasis data dan Landasan teori ini akan menjadi panduan untuk menyusun kerangka penelitian, merumuskan hipotesis, dan menganalisis data yang dikumpulkan (Lawu et al., 2022).

### **3. METODE**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan holistik mengenai proses implementasi kebijakan pembangunan Pos Pemadam Kebakaran, serta memahami dinamika sosial dan persepsi para pihak yang terlibat (Alaslan et al., 2023). Studi kasus sangat cocok untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks dunia nyata yang kompleks, yaitu kebijakan pemerintah di Kabupaten Gresik. Penelitian ini akan berlokasi di Kabupaten Gresik, dengan fokus pada kecamatan-kecamatan strategis yang menjadi target pembangunan Pos Pemadam Kebakaran, seperti Kecamatan Manyar, Kebomas, atau Driyorejo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk, konsentrasi industri, dan riwayat kejadian kebakaran yang tinggi, sesuai dengan data awal. Sumber Data utama akan diperoleh dari hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai narasumber kunci (Febryanto & Prihono, 2020).

Pihak Pemerintah yaitu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan staf perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik. Mereka akan memberikan informasi mengenai perumusan kebijakan, alokasi anggaran, dan tantangan internal (Indah et al., 2024). Pihak Pelaksana yaitu Kepala Pos Pemadam Kebakaran yang baru dibangun, serta personel di lapangan. Mereka akan memberikan insight tentang tantangan operasional dan interaksi dengan masyarakat. Pihak Swasta yaitu Perwakilan dari manajemen kawasan industri atau pabrik yang berada di sekitar lokasi Pos Damkar. Mereka akan memberikan perspektif mengenai dampak kebijakan terhadap keamanan aset dan operasional. Dan Tokoh masyarakat (Kepala Desa/Lurah), ketua RT/RW, dan warga yang tinggal di sekitar Pos Damkar. Mereka akan memberikan pandangan mengenai persepsi, partisipasi, dan manfaat langsung dari kebijakan ini (Zamdedy, 2024).

Pengumpulan Data Dengan Wawancara Mendalam, Peneliti akan menyusun panduan wawancara semi-terstruktur untuk memastikan semua aspek penting tercakup, namun tetap memberikan keleluasaan bagi narasumber untuk menyampaikan informasi secara bebas.

Wawancara akan direkam dan ditranskripsikan untuk analisis lalu Observasi Partisipatif (Terbatas) Peneliti akan melakukan observasi di lokasi Pos Damkar untuk melihat langsung kondisi fisik, fasilitas, dan interaksi antara petugas dengan masyarakat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kaya dan mendalam, memberikan pemahaman komprehensif tentang keberhasilan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kabupaten Gresik (Rivaldi et al., 2023).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Pos Pemadam Kebakaran Sebagai Simpul Peningkatan Waktu Tanggap (Response Time)**

Peran Pos Pemadam Kebakaran dalam Mempercepat Waktu Tanggap Waktu tanggap (response time) adalah salah satu indikator kunci keberhasilan operasi pemadam kebakaran. Ini mengukur seberapa cepat tim pemadam tiba di lokasi kejadian setelah menerima laporan. Dalam konteks ini, pos pemadam kebakaran memainkan peran krusial sebagai simpul strategis yang secara langsung berdampak pada peningkatan efisiensi dan kecepatan penanganan insiden (Fitri & Syahrial, 2022). Dengan menyebarkan pos-pos ini di berbagai wilayah, pemerintah daerah dapat secara signifikan mengurangi waktu tempuh dan memastikan bantuan tiba lebih cepat. Mengapa Waktu Tanggap Penting? Waktu tanggap yang cepat memiliki dampak yang sangat besar. Dalam hitungan menit, api dapat menyebar dari titik awal ke seluruh bangunan, menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan mengancam nyawa. Sebaliknya, intervensi cepat dapat membatasi kerusakan, menyelamatkan properti, dan yang terpenting, menyelamatkan nyawa. Bagi korban yang terjebak atau terluka, setiap detik sangat berharga. Selain itu, penanganan cepat juga dapat mencegah insiden kecil berkembang menjadi bencana besar yang membutuhkan sumber daya lebih banyak dan waktu pemulihan yang lebih lama (Kurnia et al., 2023).

Pos pemadam kebakaran berfungsi sebagai basis operasi kecil yang dilengkapi dengan personel dan peralatan dasar. Dengan adanya pos-pos ini, unit pemadam kebakaran tidak lagi harus selalu berangkat dari kantor pusat yang mungkin berlokasi jauh dari area padat penduduk atau kawasan industri (Musafira & Purcahyono, 2021). Beberapa peran utama pos pemadam kebakaran sebagai simpul peningkatan waktu tanggap antara lain Penyebaran Geografis: Pos-pos ini ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti area padat penduduk, kawasan industri, atau daerah pinggiran kota yang sulit dijangkau. Dengan demikian, tim pemadam dapat menjangkau lokasi kejadian dalam hitungan menit, bukan puluhan menit (Ewaldo & Naulibasa, 2023). Aksesibilitas: Dengan keberadaan pos-pos ini, tim pemadam lebih memahami kondisi

jalan, lalu lintas, dan rute tercepat di wilayah sekitarnya, sehingga dapat menghindari kemacetan dan hambatan lain yang bisa memperlambat pergerakan (Silvia et al., 2022). Respons Lokal Cepat: Pos pemadam kebakaran memungkinkan pembentukan tim respons lokal. Tim ini terdiri dari personel yang bertugas khusus untuk area tersebut. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan sekitar, termasuk sumber air terdekat, tata letak bangunan, dan potensi risiko lainnya. Pengetahuan lokal ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan intervensi awal. (Laraswati & Alam, 2023) Peningkatan Kehadiran dan Kesadaran Masyarakat: Keberadaan pos pemadam kebakaran juga meningkatkan visibilitas dan kesadaran akan pentingnya keselamatan kebakaran. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan insiden dan mengambil langkah-langkah pencegahan (Rengganawati et al., 2024).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pembangunan dan operasional pos pemadam kebakaran juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, ketersediaan lahan, dan kebutuhan akan personel tambahan. Solusi untuk mengatasi tantangan ini termasuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan merekrut relawan yang terlatih untuk membantu operasional pos. Selain itu, integrasi teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) dan sistem komunikasi terpadu dapat lebih meningkatkan efektivitas pos pemadam kebakaran. Secara keseluruhan, pos pemadam kebakaran adalah investasi strategis yang esensial dalam upaya mitigasi risiko bencana. Dengan menempatkan unit-unit ini sebagai simpul-simpul yang tersebar, pemerintah dapat secara drastis meningkatkan waktu tanggap, meminimalkan kerugian, dan melindungi nyawa masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem perlindungan publik yang lebih tanggap dan efisien.

**Tabel 2.** Transformasi Peran Pos Pemadam Kebakaran Dari Respons Darurat Menuju Pusat Edukasi Dan Pemberdayaan Komunitas

Kategori Analisis	Isu Kunci	Deskripsi Temuan
Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Pemahaman Risiko	Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa sebelum adanya program edukasi, banyak yang tidak menyadari bahaya potensial dari instalasi listrik yang buruk atau kebiasaan memasak yang ceroboh. Mereka mulai memahami bahwa pencegahan adalah kunci utama.
	Respons & Tindakan Awal	Sebagian besar warga melaporkan bahwa mereka kini lebih tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran kecil, seperti menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) atau segera menghubungi petugas. Ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas diri.
Kemitraan & Partisipasi Komunitas	Pembentukan Relawan	Analisis dokumen menunjukkan adanya inisiasi pembentukan "Relawan Kebakaran" di beberapa Rukun Warga (RW) yang berdekatan dengan

		Pos Damkar. Relawan ini dilatih secara khusus untuk memberikan bantuan awal sebelum tim utama tiba.
	Kerja Sama Lintas Sektor	Pertemuan dengan perwakilan sekolah dan industri menunjukkan adanya inisiatif untuk mengadakan simulasi evakuasi secara berkala. Ini menandakan kolaborasi yang efektif antara Pos Damkar dengan pihak swasta dan institusi pendidikan.
Ekspektasi & Harapan Terhadap Pos Damkar	Pusat Informasi	Warga berharap Pos Damkar tidak hanya menjadi tempat untuk memadamkan api, tetapi juga sebagai sumber informasi terpercaya terkait penanggulangan bencana, termasuk banjir, gempa, dan bencana non-alam lainnya.
	Fasilitator & Mentor	Pelaku industri dan pengelola gedung komersial mengharapkan Pos Damkar dapat berperan sebagai fasilitator yang memberikan audit keamanan kebakaran secara berkala, serta menjadi mentor bagi tim keamanan internal mereka.

(sumber penelitian 2025)

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kesadaran, kapasitas, serta kemitraan komunitas dalam pengelolaan risiko kebakaran dan bencana lainnya. Melalui program edukasi yang dilakukan, masyarakat menjadi lebih paham akan bahaya dari instalasi listrik yang tidak aman dan kebiasaan memasak yang ceroboh. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan preventif, seperti penggunaan APAR dan respons cepat saat kebakaran kecil terjadi, sehingga mampu menghadapi situasi darurat secara mandiri dan efektif. Selain aspek edukasi, Pos Damkar berhasil membangun jejaring sosial melalui pembentukan relawan kebakaran di tingkat RW yang dilatih untuk memberikan bantuan awal, meningkatkan kesiapsiagaan komunitas. Kemitraan strategis juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan sekolah dan industri, termasuk simulasi evakuasi secara berkala, guna memperkuat kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana secara efektif. Harapan masyarakat terhadap Pos Damkar semakin luas, tidak hanya sebagai pusat penanggulangan kebakaran tetapi juga sebagai pusat informasi dan fasilitator audit keamanan di berbagai tempat strategis. Pos Damkar diharapkan dapat menjadi mentor dalam peningkatan standar keselamatan dan kesiapsiagaan di tempat umum dan industri. Secara keseluruhan, Pos Damkar berperan sebagai pusat edukasi, jejaring sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana secara berkelanjutan, membangun kesadaran kolektif, memberdayakan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

### **Pembangunan Pos Damkar Dan Transformasi Peran Petugas Dari Pemadam Api Menjadi Penggerak Komunitas**

Transformasi Peran Petugas Pos Damkar Pembahasan ini menyoroti evolusi peran petugas Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) di Kabupaten Gresik. Pembangunan pos-pos baru di wilayah strategis bukan hanya investasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga katalisator

bagi perubahan sosial yang signifikan. Petugas kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai "pemadam api", tetapi telah bertransformasi menjadi "penggerak komunitas" dalam upaya mitigasi bencana (Noviar & Hafel, 2023). Pergeseran Peran Menuju Mitigasi Holistik Secara tradisional, peran petugas pemadam kebakaran hanya terbatas pada respons darurat: memadamkan api, menyelamatkan korban, dan mengevakuasi aset. Namun, dengan pembangunan Pos Damkar baru, terjadi pergeseran paradigma. Pemerintah daerah menyadari bahwa untuk mencapai tujuan mitigasi bencana yang berkelanjutan, fokus harus beralih dari sekadar respons reaktif menjadi pencegahan proaktif (Rajagukguk, 2025).

Transformasi ini didasarkan pada tiga pilar utama: edukasi, kemitraan, dan pemberdayaan. Pilar Edukasi: Petugas Pos Damkar kini aktif menyelenggarakan program-program edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengajarkan cara penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), melakukan simulasi evakuasi di sekolah, dan memberikan sosialisasi tentang bahaya kebakaran, seperti korsleting listrik dan kebocoran gas. Ini bertujuan untuk meningkatkan literasi bencana di kalangan warga, sehingga mereka memiliki pengetahuan dasar untuk bertindak cepat sebelum tim pemadam tiba.

Pilar Kemitraan: Petugas mulai membangun jembatan komunikasi dengan berbagai pihak. Di tingkat lingkungan, mereka berkolaborasi dengan ketua RT/RW untuk membentuk "relawan kebakaran" yang terlatih. Relawan ini menjadi mata dan telinga pertama di lapangan, memberikan informasi vital dan bantuan awal. Di sisi lain, kemitraan juga terjalin erat dengan sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan di kawasan industri. Petugas berperan sebagai konsultan yang memberikan audit keamanan kebakaran dan saran profesional, membantu perusahaan mengurangi risiko operasional.

Pilar Pemberdayaan: Melalui interaksi yang intensif ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pertolongan, tetapi subjek yang memiliki kapasitas untuk bertindak. Petugas Pos Damkar membantu memberdayakan warga, sekolah, dan industri untuk menjadi lebih mandiri dalam menghadapi ancaman. Hal ini menciptakan ekosistem mitigasi bencana yang terintegrasi, di mana Pos Damkar berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan dan mengoordinasi semua upaya (Rochim et al., 2022).

### **Dampak dan Signifikansi Transformasi**

Transformasi ini memiliki dampak yang signifikan. Di satu sisi, ia meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi beban panggilan darurat melalui pencegahan. Di sisi lain, yang lebih penting, ia membangun fondasi sosial yang kuat. Masyarakat merasa lebih aman karena mereka tahu bagaimana harus bertindak, dan mereka memiliki hubungan personal dengan petugas yang mereka kenal dan percaya. Dengan demikian, pembangunan Pos Damkar

di Gresik adalah investasi ganda. Pertama, pada infrastruktur fisik yang secara langsung meningkatkan waktu tanggap. Kedua, pada modal sosial yang membangun ketahanan komunitas. Petugas Pos Damkar kini bukan lagi sekadar tim penolong, melainkan agen perubahan yang secara aktif membentuk budaya kesiapsiagaan. Ini adalah model ideal dari implementasi kebijakan yang tidak hanya memenuhi tujuan teknis, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan.

**Tabel 3.** Respon Komunitas Dan Adaptasi Perilaku Menghadapi Bencana

Kategori Analisis	Isu Kunci	Deskripsi Temuan
Perubahan Perilaku Warga	Kesiapsiagaan Dini	Warga menyampaikan bahwa setelah sosialisasi, mereka lebih peka terhadap potensi bahaya kebakaran di rumah. Beberapa bahkan menceritakan bahwa mereka secara mandiri telah memasang detektor asap atau membeli APAR.
	Pergeseran Pola Pikir	Pola pikir warga bergeser dari "menunggu bantuan" menjadi "bertindak awal." Mereka kini lebih proaktif dalam memadamkan api kecil dengan cara sederhana sebelum menghubungi Pos Damkar.
Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah	Peningkatan Kepercayaan Publik	Adanya Pos Damkar yang berlokasi dekat membuat masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah. Kecepatan respons dan program edukasi yang nyata membangun kepercayaan bahwa pemerintah serius dalam melindungi warganya.
	Harapan akan Keterlibatan yang Lebih Besar	Warga menyampaikan keinginan untuk dilibatkan lebih jauh, misalnya melalui program patroli keamanan lingkungan atau pelatihan lebih intensif yang diselenggarakan oleh Pos Damkar.

*(Sumber penelitian 2025)*

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa respons komunitas dalam menghadapi risiko bencana, khususnya kebakaran, menunjukkan perkembangan positif dalam aspek perilaku dan persepsi. Setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi, warga menjadi lebih sadar akan potensi bahaya kebakaran di lingkungan mereka, sehingga muncul kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dini. Mereka tidak lagi bersikap pasif, melainkan mulai mengambil langkah mandiri seperti memasang detektor asap dan alat pemadam api ringan (APAR). Hal ini menunjukkan pergeseran pola pikir dari orientasi menunggu bantuan menjadi sikap proaktif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya. Selain itu, keberadaan Pos Damkar yang strategis di desa meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa mendapatkan perhatian dan perlindungan yang nyata, serta merasakan respons cepat saat terjadi kebakaran. Masyarakat pun berharap agar keterlibatan pemerintah dalam soal keamanan lingkungan diperluas, misalnya melalui program patroli keamanan dan pelatihan yang lebih intensif. Secara umum, proses adaptasi ini memperlihatkan bahwa edukasi dan kehadiran institusi penanggulangan bencana mampu meningkatkan kesadaran serta membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif dalam upaya perlindungan diri dan lingkungan dari risiko bencana.

## **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan pos pemadam kebakaran di Kabupaten Gresik merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana kebakaran, khususnya di wilayah strategis yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas industri tinggi. Melalui pembangunan pos-pos baru di kecamatan seperti Manyar, Kebomas, dan Driyorejo, diharapkan mampu mempercepat respons tanggap dalam menangani kebakaran, sehingga dapat meminimalisir kerusakan dan kerugian yang timbul akibat kebakaran tersebut. Transformasi peran petugas Pos Damkar dari yang semula berfungsi sebagai pemadam api menjadi penggerak komunitas merupakan aspek penting yang ditekankan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana secara holistik. Petugas tidak lagi hanya bertindak secara reaktif saat terjadi kebakaran, tetapi juga berperan dalam edukasi masyarakat, pembentukan relawan, dan pelaksanaan simulasi evakuasi secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran di lingkungan mereka. Selain pembangunan fisik dan peralatan modern, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, ketersediaan lahan, serta kebutuhan akan personel yang cukup dan terlatih. Solusi yang diusulkan meliputi kemitraan dengan sektor swasta, optimalisasi penggunaan teknologi seperti GIS dan sistem komunikasi terpadu, serta merekrut relawan yang kompeten. Pendekatan ini sangat penting agar efektivitas pos-pos pemadam kebakaran dapat maksimal, mampu menjangkau wilayah yang luas, dan mempercepat waktu tanggap saat kejadian kebakaran. Pelibatan masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan program mitigasi ini. Melalui program edukasi dan sosialisasi yang intensif, masyarakat menjadi lebih sadar akan potensi risiko kebakaran dan tahu langkah awal yang harus dilakukan saat kebakaran terjadi, seperti menggunakan APAR dan menghubungi petugas. Pembentukan relawan dan kerja sama lintas sektor, termasuk pihak sekolah dan industri, juga memperkuat kapasitas komunitas dalam melakukan tindakan preventif dan membantu proses evakuasi atau penanggulangan jika terjadi kebakaran. Secara keseluruhan, keberadaan Pos Damkar yang strategis dan program edukasi masyarakat yang berkelanjutan berpotensi mengubah paradigma penanganan kebakaran dari yang semula bersifat reaktif menjadi preventif dan proaktif. Hal ini menunjukkan keberhasilan inisiatif pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial dan infrastruktur yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Dengan demikian, pembangunan pos pemadam kebakaran di Gresik bukan hanya sebagai investasi infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai modal

sosial yang penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan sadar risiko dalam menghadapi ancaman kebakaran.

## DAFTAR REFERENSI

- Alaslan, A., Amane, A. P. O., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., & Sutrisno, E. (2023). *Penelitian metode kualitatif* (D. Achmad Hidir, Ed.; 1 ed.). Indonesia: Perkumpulan Rumah Cemerlang. <https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s>
- Ambarwati, V., Kurniawan, H. W., & Sa, M. (2025). Sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran di Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme Kota Gresik. *Buletin Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 69–75. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i1.1306>
- Candra, V. A., & Prabawati, I. (2025). Implementasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 7, 1–12.
- Ewaldo, K., & Naulibasa, G. V. (2023). Analisis penyebaran dan radius jangkauan fasilitas kesehatan di Kabupaten Way Kanan berbasis sistem informasi geografis. *Jurnal Teknik Sipil dan Inovasi*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v5i1.15378>
- Fariza, A., & Handayani, B. L. (2022). Tindakan struktural mitigasi bencana pemerintah di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial*, 11(2), 288–305. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i2.57282>
- Febryanto, I. D., & Prihono. (2020). Model jaringan rantai pasok untuk pos pemadam. *Tekmapro: Jurnal Teknologi Manajemen Produksi*, 16(1), 1–11. <https://doi.org/10.33005/tekmapro.v16i1.169>
- Fitri, A., & Syahrial, I. (2022). Implementasi standar pelayanan minimal (SPM) penanggulangan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.69989/rxjs7e02>
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Aprin, S. (2024). KESBANGPOL Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(2), 100–112.
- Kurnia, K. N., Meigawati, D., & Sampurna, R. H. (2023). Upaya peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 369–381. <https://doi.org/10.32663/8hd9d455>
- Laraswati, D., & Alam, F. F. (2023). Penerapan metode waterfall pada sistem informasi pelaporan kebakaran berbasis website. *Infortech: Jurnal Informatika dan Teknologi*, 5(2), 185–189. <https://doi.org/10.31294/infortech.v5i2.18405>
- Lawu, S. H., Ali, H., & Bhayangkara, U. (2022). Perencanaan strategis sistem informasi dengan pendekatan Enterprise Architecture, Ward and Peppard. *Indonesian Journal of Computer Science*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31294/ijcs.v1i1.1162>

- Made, I. D., & Septanaya, F. (2024). Skenario penyediaan pos pemadam kebakaran untuk melayani bangunan tinggi di kota. *Jurnal Arsitektur*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.12962/j2716179X.v19i0.21087>
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Az, S., & Kania, Z. (2025). Implementasi kebijakan publik: Pengertian, model, dan studi kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(1), 69–73.
- Musafira, & Purcahyono, J. (2021). Analisa kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran di Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen Aset Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.58839/jmap.v11i1.886>
- Noviar, R., & Hafel, M. (2023). Peran Damkar sebagai pelayanan pemadam kebakaran di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *Publicuho: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 658–670. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.164>
- Putri, S. D. (2024). Evaluasi program penempatan pos-pos pemadam kebakaran dalam menanggulangi bencana di Kota Palembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 1–11.
- Rajagukguk, N. J. (2025). Peran hukum dalam mitigasi bencana: Analisis kebijakan dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 15–21.
- Rengganawati, H., Widiawati, S., Salim, A., & Hermawan, I. (2024). Peningkatan keterampilan dan kesadaran masyarakat Tenjolaya melalui pendekatan komprehensif. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(1), 1–10.
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Jurnal Riset Metodologi Sosial*, 1(1), 20–30.
- Rochim, M. A., Syahru, Y., Fiyani, A. L., Ulfa, A., Industri, T., & Universitas Pancasakti. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program sosial. *Jurnal Abdimas*, 1(1), 66–72.
- Rohimah, B., Muniroh, D., Pertiwi, F. H., & Larassaty, A. L. (2023). Pengaruh keselamatan-kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Pos Pemadam Kebakaran Unit Krian. *Jurnal Publikasi Manajemen*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i1.1163>
- Septiawan, C., & Sujana, E. (2022). Pengembangan model implementasi kebijakan di perguruan tinggi swasta: Studi kasus Universitas Indonesia Maju. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(2), 2119–2126.
- Silvia, F., Hadiyanto, P., & Rachim, A. (2022). Disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 225–232. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Tyas, T. H., Sutina, S., Supriyatno, M., Maarif, S., & Fikri, A. F. (2022). Penanganan bencana banjir di Kota Kediri melalui mitigasi non-struktural. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 18(2), 178–191. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i2.35564>
- Zamedy. (2024). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah. *Syntax Idea*, 6(4), 1–12. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3152/>